

Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur

Erfan Muhammad¹, Fitri Ahmad Kurniawan², Enur Hotimah³, Ahmad Hanafi⁴

¹Universitas Trunojoyo Madura, erfan94@yahoo.com

²Universitas Trunojoyo Madura, fitri.kurniawan@trunojoyo.ac.id

³STEBIS YPII, enurhotimah839@gmail.com

⁴IAIN Palangka Raya, ahmadhanafi@iain-palangkaraya.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 04/10/2023

Revised : 05/10/2023

Accepted: 06/10/2023

Key words:

Auditor, Control System, Fraud
Detection, Fraud Prevention

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037)

ABSTRACT

This study explores the literature in depth about fraud prevention in sharia-based organizations. The first section explains the impact of fraud on organizations. Then it is explained how fraud can be carried out in various ways. Next, emphasis is placed on the role of auditors in detecting fraud along with various methods that can be applied to detect fraud violations. Apart from that, it also focuses on preventing fraud as a preventive measure by building a control system. This research emphasizes sharia-based organizations, both the sharia financial industry and sharia non-profit institutions. It offers multiple perspectives from an extensive literature study together with theoretical perspectives applied in previous studies. Therefore, the discussion of this research can be used as a starting point for empirical studies.

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi literatur secara mendalam tentang pencegahan Fraud dalam organisasi berbasis syariah. Bagian pertama menjelaskan dampak penipuan pada organisasi. Kemudian diuraikan bagaimana penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selanjutnya ditekankan pada peran auditor dalam pendeteksian kecurangan beserta berbagai metode yang dapat diterapkan untuk mendeteksi pelanggaran kecurangan tersebut. Selain itu, juga berfokus pada pencegahan penipuan sebagai tindakan pencegahan dengan membangun sistem kontrol. Penelitian ini menekankan pada organisasi berbasis syariah baik industri keuangan syariah maupun lembaga nirlaba syariah. Ini menawarkan berbagai perspektif dari studi literatur yang luas bersama-sama dengan perspektif teoretis yang diterapkan dalam studi sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini dapat digunakan sebagai titik tolak untuk studi empiris.

1. PENDAHULUAN

Istilah "penipuan" memiliki cakupan yang luas. Menurut Black's Law Dictionary, penipuan adalah "penyimpangan yang diketahui dari kebenaran atau penyembunyian fakta utama untuk membujuk orang lain agar bertindak yang merugikannya." Penipuan manajemen, juga dikenal sebagai penipuan laporan keuangan, dan penipuan karyawan, kadang-kadang dikenal sebagai penggelapan, adalah dua jenis penipuan akuntansi (Pedneault, 2009). Untuk meminimalkan kecurangan laporan keuangan, American Institute of CPAs mengeluarkan SAS No. 82: Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan. SAS baru menggantikan SAS no. 53. Tanggung Jawab Auditor untuk Mengidentifikasi dan Melaporkan Kesalahan dan Inkonsistensi (Mancino, 1997). Fokus

utama SAS No. 82 adalah pada bahaya salah saji yang signifikan sebagai akibat dari pelaporan keuangan yang tidak jujur dan pencurian aset (yaitu, defalcation). Penipu dapat menggunakan berbagai taktik untuk memalsukan akun keuangan dan mencuri aset perusahaan. Karena sifatnya yang kompleks, siklis, dan dinamis, menilai penipuan berdasarkan peristiwa masa lalu saja tidak dapat menawarkan dasar yang tepat untuk mendeteksi (atau mencegah) penipuan (Reinstein & Bayou, 1998). Selain memalsukan laporan keuangan dan menyalahgunakan aset, penipu mungkin menggunakan teknik korupsi untuk mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan posisi mereka di sebuah perusahaan. Benturan kepentingan, suap, gratifikasi gelap, dan pemerasan ekonomi adalah contoh skema korupsi.

Penyalahgunaan aset menyumbang sekitar 80% kasus, diikuti oleh korupsi sebesar 15%, pernyataan palsu sebesar 4%, dan lainnya sebesar 1% (Reinstein & Bayou, 1998).

Pada bulan Oktober 2002, SAS No. 82 diganti dengan SAS No. 99. Menurut SAS No.99, ketika terjadi kecurangan, keadaan berikut lazim terjadi: pertama, adanya motivator; kedua, adanya peluang (misalnya, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian, tidak adanya pengendalian, atau pengendalian yang tidak efektif); dan Ketiga, pelaku penipuan mungkin memaafkan perilaku penipuan mereka (Kapardis & Kapardis, 2004; Norman et al., 2010; Skousen et al., 2008). "Segitiga penipuan" juga mengacu pada tiga komponen risiko penipuan: tekanan, peluang, dan logika. Penerapan fraud triangle dalam SAS No.99 mengharuskan auditor mengevaluasi secara menyeluruh tekanan, peluang, dan justifikasi untuk mendeteksi adanya perilaku curang (Skousen et al., 2008). Sebaliknya, penelitian teori atribusi menyiratkan bahwa pola pikir seseorang, kendala atau peluang eksternal, dapat menjelaskan atau memprediksi perilaku yang tidak diinginkan (seperti penipuan)(Wilks & Zimbelman, 2004a). Ramamoorti (2008), di sisi lain, mengklaim bahwa peluang kriminal mungkin muncul dalam keadaan yang lemah dan bahwa pelaku penipuan dapat diberi imbalan pidana yang menguntungkan tanpa konsekuensi. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa para ilmuwan perilaku tidak dapat menemukan kualitas psikologis atau kelompok kualitas yang terdefinisi dengan baik dan dipahami dengan baik yang membedakan pelaku penipuan (Ramamoorti, 2008).

Domain penipuan laporan keuangan berbeda karena memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) rasio perusahaan penipuan terhadap non-penipuan sederhana atau kemungkinan penipuan rendah; (2) lebih mahal untuk mengkategorikan perusahaan penipuan sebagai perusahaan non-penipuan daripada mengklasifikasikan perusahaan non-penipuan sebagai perusahaan penipuan; (3) nilai atribut yang sama dapat menunjukkan perilaku penipuan dan non-penipuan; (4) Pelaku penipuan secara agresif berusaha untuk menyamarkan penipuan dengan membuat nilai atribut

perusahaan penipuan tampak sebanding (Perol, 2011).

Pada bulan Desember 2008, Deloitte Forensic Center menerbitkan studi yang mengidentifikasi taktik penipuan laporan keuangan yang secara rutin digunakan oleh perusahaan publik:

- Pengakuan pendapatan yang tidak akurat (38%)
- Pengungkapan yang tidak akurat menyumbang 11% dari total.
- Manipulasi biaya menyumbang 11% dari total.
- Manipulasi kewajiban menyumbang 8% dari total.
- Manipulasi aset menyumbang 8% dari total.
- 7 persen manipulasi cadangan
- Manipulasi piutang usaha 4 persen

Menurut National Center on Occupational Fraud and Abuse, pencurian aset atau penggelapan karyawan menyumbang 88,7 persen kasus penipuan, dengan kerugian rata-rata \$200.000. Ini juga mengungkapkan bahwa pekerja tingkat bawah melakukan pencurian karyawan paling banyak, yaitu 39,9 persen, dibandingkan dengan 37,9 persen untuk karyawan tingkat manajer dan 22,2 persen untuk pemilik atau anggota manajemen berpangkat tinggi. Pencurian uang tunai, suap, dan suap adalah metode penipuan yang paling umum, menurut penelitian untuk organisasi nirlaba. Pencurian uang tunai mengakibatkan kerugian rata-rata \$45.527. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa karyawan pria dan wanita melakukan persentase pencurian uang tunai yang sama, dengan kelompok usia 40 hingga 49 tahun melakukan tingkat pencurian terbesar (35 persen).(Pedneault, 2009).

Dalam penelitian sebelumnya, Reinstein dan Bayou (1998) menemukan perbedaan besar antara kerugian yang disebabkan oleh laporan keuangan yang menyesatkan (\$4.000.000) dan kerugian yang disebabkan oleh bentuk penipuan lainnya, seperti korupsi (\$440.000), pencurian aset (\$85.000), dan lainnya (\$107.000)). Sementara itu, pencuri dan penjahat rata-rata mendapatkan \$400-\$500 per pukulan. Selanjutnya, jika komputer digunakan, biaya penipuan karyawan antara \$ 20.000 dan \$ 50.000(Reinstein dan Bayou 1998). Kapardis-Kapardis (2002), KPMG (2002), Ernst and Young

(2003), dan Price Waterhouse Coopers (2003) melakukan lebih banyak survei (2003). KPMG (2002) melakukan survei terhadap kejadian penipuan di perusahaan-perusahaan di Australia dan Selandia Baru dan menemukan bahwa 361 responden mengalami kerugian sekitar AU\$273 juta. Kapardis-Kapardis (2002) mempelajari 441 perusahaan di Siprus dan menemukan bahwa 57% sebelumnya telah menjadi korban penipuan. Selanjutnya, menurut Ernst & Young (2003), 85 persen penipuan dilakukan oleh seseorang yang membayar gaji perusahaan. Akhirnya, PWC (2003) melakukan wawancara dengan 189 eksekutif senior dari organisasi terkemuka di 50 negara dan menemukan bahwa 37% responden melaporkan kejahatan ekonomi yang substansial dalam dua tahun sebelumnya, dengan penyelewengan aset menjadi penipuan yang paling sering dilaporkan (Kapardis dan Kapardis 2004). Oleh karena itu, penipuan dianggap sebagai masalah yang sangat mahal (Reinstein & Bayou, 1998).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelanggaran Penipuan

Paterson dan Noel (2008) mengembangkan model yang mencakup tiga bentuk penipuan: defalcation, pelaporan keuangan yang curang, dan defalcation yang dicampur dengan pelaporan keuangan yang curang. Laporan keuangan juga telah digunakan untuk penipuan atau penipuan kriminal, mendapatkan properti dengan alasan, pemalsuan bank, dan menyembunyikan aset dalam prosedur kebangkrutan (Simon, 1965). Selanjutnya, Paterson dan Noel (2008) berhipotesis bahwa penipu sangat termotivasi untuk melakukan penipuan ketika dihadapkan dengan harapan yang tinggi untuk kesuksesan bisnis dan berusaha untuk membuat klaim mereka sangat kredibel. Jika tidak, hukuman yang efektif akan berdampak pada bahaya misrepresentation atau defalcation ketika ekspektasi tidak berlebihan. Akibatnya, peningkatan sanksi efektif akan meminimalkan kemungkinan penipuan. Akibatnya, (1) auditor berkonsentrasi untuk mendeteksi kecurangan dengan hukuman efektif terendah; (2) biaya pekerjaan, yang mempengaruhi kekuatan proses

audit; dan (3) kondisi industri, yang memengaruhi keandalan laporan (Patterson & Noel, 2008).

Meskipun setiap perusahaan unik dalam hal industri, ukuran, dan kompleksitas, mereka masih mengikuti siklus keuangan fundamental yang sama. Berikut ini adalah siklus keuangan utama yang mungkin terlihat di setiap organisasi:

- Keuntungan (termasuk retur penjualan)
- Penerimaan kas • Pembelian • Persediaan • Pengeluaran kas
- Penggajian • Akuntansi dan pelaporan keuangan (Pedneault, 2009).

Grazioli dkk. (2006) mengidentifikasi enam teknik penipuan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan aktivitas penipuan. Tiga strategi pertama dirancang untuk menghalangi prosedur pengumpulan-informasi, dan mereka termasuk (1) Masking: menghalangi atau menghilangkan kualitas inti; (2) Mompesona: atribut inti yang membubarkan atau membingungkan; dan (3) Decoying: mengalihkan perhatian korban dari inti. Tiga strategi terakhir ditujukan untuk merangsang scam, yaitu mempengaruhi kategorisasi korban dan interpretasi data. Hal ini dapat dicapai dengan (4) pengemasan ulang: membingkai atau memberi label inti dengan cara yang menyebabkan korban salah mengklasifikasikannya; (5) Meniru: mengubah inti agar tampak seperti sesuatu yang lain; dan (6) Putar ganda (Grazioli et al., 2006).

Deteksi Penipuan

Deteksi penipuan adalah jenis deteksi penipuan. Ini adalah fenomena ilmiah yang luas yang telah diselidiki oleh para ahli dari berbagai bidang. Akibatnya, auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang penipuan serta keahlian teknis (akuntansi dan audit) untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh aktor lain. Pengetahuan penipuan dapat diperoleh melalui pengalaman, yang mungkin ditemui auditor dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, sedangkan pengetahuan akuntansi diperlukan untuk menerapkan strategi khusus untuk pemeriksaan laporan keuangan. Dalam keadaan tertentu, auditor akan gagal menemukan kecurangan karena kurangnya eksposur yang memadai terhadap kejahatan kecurangan (Grazioli

et al., 2006). Akibatnya, menurut Srivastama et al. (2009), hubungan timbal balik antara tiga aspek risiko penipuan utama (segitiga penipuan): insentif, sikap, dan peluang harus dimasukkan dalam rumus untuk menghitung risiko penipuan. Rumus akan memudahkan untuk mengukur pengaruh risiko dan kontrol yang terkait dengan tiga kriteria risiko penipuan ini, yang memberikan bukti adanya atau tidak adanya penipuan (Srivastama dkk., 2009). Misalnya, untuk mengurangi aktivitas penipuan, pemegang saham dapat mengadopsi berbagai strategi, termasuk kualitas audit, remunerasi manajerial, dan tata kelola perusahaan eksternal. Ketika tata kelola eksternal berada dalam kategori menengah, disarankan untuk mengandalkan audit untuk kompensasi manajemen. Lebih jauh lagi, dalam hal perencanaan remunerasi manajemen, ekuitas dapat memperkuat insentif manajerial sementara opsi saham mungkin menurunkannya (Pagano & Immordino, 2008).

Dekonstruksi komponen risiko kecurangan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko kecurangan. AHP merupakan salah satu metode dekomposisi (Analytic Hierarchy Process Approach). Ini dapat digunakan sebagai strategi audit yang sah ketika auditor merasakan kebutuhan untuk melakukan penilaian dan/atau memasukkan umpan balik kelompok ke dalam suatu kesimpulan. Setiap perikatan audit adalah unik, dan tanda bahaya yang berbeda dapat dinilai penting berdasarkan industri, jenis bisnis, atau keahlian atau penilaian auditor (Deshmukh & Millet, 1998). Wilks dan Zimbelman (2004) menemukan bahwa auditor yang mendekonstruksi evaluasi kejahatan keuangan lebih rentan terhadap sinyal peluang dan motivasi dibandingkan dengan auditor yang hanya mengandalkan penilaian risiko penipuan secara keseluruhan, bahkan ketika indikator tersebut menunjukkan eksposur risiko minimal. Namun, ketika sinyal peluang dan motivasi menunjukkan kecurangan dan kesalahan yang tinggi, perhatian auditor terhadap isyarat tersebut sama apakah segmentasi atau teknik terintegrasi digunakan (Wilks & Zimbelman, 2004b).

Dampak dekonstruksi bervariasi tergantung pada apakah auditor internal atau eksternal.

Dekomposisi tidak berpengaruh pada auditor internal dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada auditor eksternal. Auditor internal akan lebih memperhatikan isyarat sikap manajemen di semua tingkat risiko sebagai akibat dari dekonstruksi penilaian risiko penipuan. Auditor internal dan eksternal akan bereaksi berbeda terhadap dekomposisi risiko tergantung pada persyaratan praktik dan pengaturan peraturan yang mereka hadapi. Akibatnya, meningkatkan praktik audit dan prosedur penilaian risiko mungkin memiliki efek yang tidak terduga pada audit internal (Norman dkk., 2010). Dekomposisi, di sisi lain, akan meningkatkan total jam yang dialokasikan untuk keadaan risiko penipuan tinggi dan rendah. Ketika sampai pada keputusan prosedur audit, auditor akan tetap berpegang pada pendekatan audit yang sama, yang mungkin efektif atau tidak efektif dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, auditor harus menilai teknik yang cenderung tidak statis di tengah risiko penipuan (Zimbelman, 1997).

Informasi diagnostik (relevan) dibedakan dengan informasi non-diagnostik (irrelevant). Ketika auditor menggunakan keahlian teknis untuk menemukan dan memproses kriteria diagnostik, mereka dapat memperkirakan risiko penipuan (Seo, 2009). Meskipun pengetahuan auditor mengandung redundansi, efektivitas deteksi kadang-kadang berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah kesalahan. Lebih jauh, kesalahan dapat berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan pola perilaku yang rumit (Grazioli et al., 2006). Akibatnya, auditor sering menggunakan pengetahuan teknis bantuan keputusan untuk memperkirakan risiko penipuan. Alat bantu keputusan dapat membantu auditor pemula atau yang kurang pengetahuan meningkatkan kinerja mereka, tetapi mungkin memiliki dampak perilaku yang tidak diinginkan dan/atau kontradiktif pada pengguna berpengalaman (Seo, 2009). Investigasi Knapp dan Knapp (2001) menggunakan prosedur penilaian risiko tertentu menghasilkan hasil yang serupa. Menurut temuan mereka, melakukan evaluasi risiko penipuan yang terpisah dan jelas meningkatkan kemanjuran penilaian risiko penipuan. Beberapa perusahaan audit dapat meningkatkan penilaian kerentanan dengan

meminta tinjauan terpisah alih-alih memasukkannya ke dalam penilaian risiko secara keseluruhan (Knapp & Knapp, 2001).

Individu dengan tingkat keahlian teknis yang lebih tinggi diprediksi lebih baik dalam mendeteksi dan memproses variabel diagnostik. Mereka, di sisi lain, kurang rentan untuk salah mengidentifikasi dan menafsirkan isyarat non-diagnostik sebagai isyarat diagnostik yang penting (Knapp & Knapp, 2001; Seow, 2009). Temuan ini konsisten dengan studi masa lalu Choo (1996). Choo menggunakan MDA (Multiple Discriminant Analysis) untuk menunjukkan bahwa aktivitas dan kejadian audit yang tidak terduga memiliki dampak yang lebih besar pada kemampuan penalaran auditor daripada fakta dan keputusan audit tipikal dalam pekerjaan going concern. Hal ini dapat dijelaskan oleh salah satu dari dua faktor: (1) Auditor yang berpengalaman mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi "struktural yang dalam"; dan (2) Sebuah badan penelitian yang konsisten menunjukkan bahwa auditor yang kompeten mempertahankan rasa "skeptisisme profesional". Studi ini menemukan bahwa auditor dengan tingkat abstraksi pengetahuan yang lebih tinggi membuat keputusan going concern yang lebih baik (Cho, 1996).

Kantor Akuntan Publik mungkin berbeda dalam beberapa hal, termasuk apakah alat bantu praktik penilaian risiko penipuan berbeda atau terkait dengan alat bantu aktivitas analisis risiko lainnya, waktu evaluasi risiko, dan mekanisme pendeteksian risiko penipuan (Shelton et al., 2001). Variabel non-keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan penipuan (NFM). Pendukung NFM berpendapat bahwa mengubah NFM sulit disembunyikan karena verifikasi NFM biasanya sederhana. Pertama, Laporan keuangan disiapkan secara internal, dan manajemen memiliki wewenang untuk mengesampingkan kontrol keuangan, sedangkan NFM tertentu dibuat dan diterbitkan oleh sumber pihak ketiga (misalnya, kepuasan pelanggan). Kedua, sementara banyak NFM mudah dibuktikan (misalnya, frekuensi akuisisi, unit manufaktur, atau pekerja), implikasi keuangan tertentu lebih sulit dipastikan (misalnya, ketentuan untuk estimasi akun yang

dipertanyakan). Ketiga, jika manajemen mencoba mendorong NFM untuk menyamarkan penipuan, ini harus memerlukan tingkat koordinasi yang lebih besar untuk menyembunyikannya karena data keuangan yang salah dan NFM terlibat. Akhirnya, memanipulasi NFM memerlukan sepotong data lain yang harus dibuat oleh manajemen, memperumit tindakan penipuan.

Selanjutnya, NFM tidak dibatasi oleh ukuran keuangan standar (yaitu, konsentrasi jangka pendek, penekanan pada kelompok kecil pemangku kepentingan, dan saran yang tidak memadai untuk kegiatan di masa depan). Jika indikator keuangan (misalnya, pertumbuhan penjualan) menunjukkan pola yang bertentangan dengan NFM, penipuan dapat dideteksi (misalnya, pertumbuhan fasilitas). Kesenjangan antara kinerja keuangan dan non-keuangan secara signifikan lebih besar untuk perusahaan yang melanggar hukum daripada untuk organisasi yang tidak melakukan penipuan. Secara keseluruhan, temuan ini menawarkan dukungan objektif bahwa NFM dapat digunakan untuk memperkirakan risiko penipuan secara efisien NFM tidak dibatasi oleh ukuran keuangan standar (yaitu, konsentrasi jangka pendek, penekanan pada kelompok kecil pemangku kepentingan, dan saran yang tidak memadai untuk kegiatan di masa depan). Jika indikator keuangan (misalnya, pertumbuhan penjualan) menunjukkan pola yang bertentangan dengan NFM, penipuan dapat dideteksi (misalnya, pertumbuhan fasilitas). Kesenjangan antara kinerja keuangan dan non-keuangan secara signifikan lebih besar untuk perusahaan yang melanggar hukum daripada untuk organisasi yang tidak melakukan penipuan (Brazel et al., 2009).

Menjamin keakuratan informasi adalah peran masyarakat yang penting. Meskipun kemajuan dalam deteksi penipuan, seperti analisis statistik (misalnya, Nieschwietz et al. 2000) dan pemodelan teori permainan (misalnya, Wilks dan Zimbelman 2004), profesional seperti auditor, pengontrol, dan akuntan forensik masih diperlukan untuk mendeteksi informasi keuangan strategis. representasi yang salah. Menurut Bella DePaulo, dirujuk oleh Grazioly et al. (2006), manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk mengekstrak

informasi bahkan dari potongan informasi terkecil dan sangat efektif dalam menalar tentang pikiran agen kognitif lain jika dibandingkan dengan teknologi lain (Grazioli et al., 2006). Akibatnya, pejabat audit harus mengganti norma yang membatasi pemikiran strategis di antara auditor dengan persyaratan yang mendorongnya (Wilks & Zimbelman, 2004a).

Pencegahan Penipuan

Pencegahan penipuan adalah proses mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab penipuan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa penipuan bukanlah peristiwa acak dan akan terjadi ketika kondisinya menguntungkan. Akibatnya, pertahanan terkuat melawan penipuan adalah meningkatkan proses organisasi untuk mengurangi atau menghilangkan komponen penyebab penipuan, dan pencegahan penipuan harus mencakup kegiatan jangka pendek (prosedural) dan jangka panjang (budaya). Pencegahan adalah pemeriksaan lingkungan dan praktik yang mendorong penipuan. Kemudian lihat apa yang bisa terjadi di suatu lokasi dan individu-individu yang terlibat dalam proses tersebut. Akibatnya, pencegah adalah tindakan pencegahan—mengurangi variabel input (Cendrowski dkk., 2007). Ini harus fokus pada penanganan masalah interpersonal dan perilaku yang mendasari - psikologi pelaku penipuan. Segitiga penipuan adalah pendekatan sistematis yang berguna untuk memahami penyebab utama penipuan dan perilaku yang memfasilitasinya. Mengembangkan kebijakan dan sistem anti-penipuan sangat penting dari sudut pandang organisasi (Ramamoorti, 2008).

Pencegahan pelaporan keuangan dan pencurian aset yang curang memerlukan penerapan empat jenis peraturan dan proses yang terpisah: pertama, budaya organisasi (bisnis), yang merupakan komponen terpenting dalam mencegah pelaporan keuangan yang curang. Ini berfungsi sebagai dasar untuk semua upaya pelaporan keuangan. Kedua, tata kelola perusahaan (organisasi): Ini terdiri dari banyak bagian organisasi serta interaksinya. Ketiga, dalam hal pengendalian internal untuk pencegahan, manajemen puncak dapat mengesampingkan

sistem pengendalian internal. Akibatnya, pengendalian internal standar tidak efektif mencegah pelaporan keuangan yang menyesatkan. Untuk melakukan penipuan, penipu harus memahami bagaimana mekanisme pengendalian internal organisasi bekerja. Kemudian mereka mencari dan menggambarkan informasi yang dapat digunakan untuk menutupi kejahatan mereka. Dengan kata lain, si penipu harus berpikir secara strategis (Wilks & Zimbelman, 2004a). Setidaknya, pelaku perlu memahami tindakan organisasi berdasarkan representasi kognitif. Oleh karena itu, proses kognitif dapat dimanipulasi (Grazioli et al., 2006).

Jika budaya perusahaan diadopsi dan diatur, itu akan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan pelaporan keuangan palsu. Akhirnya, dalam hal pemantauan pencegahan, dua komponen penting untuk keberhasilan pemantauan penipuan akuntansi adalah anggota dewan yang efektif dan departemen pemantauan yang efektif. Dewan direksi yang sukses sebagian besar terdiri dari direktur non-manajemen yang kompeten, terlibat, dan aktif. CEO tidak boleh menjabat sebagai ketua dewan eksekutif. Dewan eksekutif harus sering mengadakan pertemuan dan menyadari kesulitan keuangan dan akuntansi organisasi. Audit internal adalah kegiatan verifikasi dan konsultasi yang tidak memihak dan objektif yang menambah nilai dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ini membantu bisnis dalam memenuhi tujuannya dengan menganalisis dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, pengendalian internal, dan prosedur tata kelola yang lebih baik. Auditor internal harus bekerja dalam peran investigasi internal komite audit (Cendrowski dkk., 2007).

Fraud di Organisasi Berbasis Syariah

Kecurangan terjadi tidak hanya pada organisasi profit, tetapi juga pada organisasi non profit. Penipuan adalah masalah yang menyebar di organisasi nirlaba, yang tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas (Bradley, 2015). Sebuah survei yang dilakukan pada konsekuensi penipuan di organisasi nirlaba menunjukkan bahwa lebih dari seperempat dari 115 organisasi tidak bertahan setelah 3 tahun penipuan dipublikasikan. Organisasi yang lebih

besar dan lebih tua kemungkinan besar akan bertahan (Archambeault & Webber, 2018). Penipuan dalam organisasi nirlaba akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama jika organisasi nirlaba tersebut memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, atau sosial. Layanan akan terganggu (Bradley, 2015). Selain kerugian finansial, penipuan di organisasi nirlaba akan berdampak pada kerusakan reputasi terutama akan berdampak pada donor, pemberi hibah, atau sumber publik lainnya. Oleh karena itu, reputasi adalah aset paling berharga bagi organisasi (Mark, 2012).

Salah satu karakter organisasi nirlaba yang memiliki omset tinggi karena kemungkinan besar bergantung pada relawan dan anggota komunitas. Oleh karena itu, pelatihan dan pemisahan tugas cenderung lebih sulit, dan akibatnya, pengendalian internal tidak terbentuk dengan baik. Selain itu, sebagian besar anggota dewan dan eksekutif tidak dilengkapi dengan pengetahuan keuangan dan cenderung mempercayai anggota organisasi (Mark, 2012). Karyawan mungkin melakukan penipuan dalam banyak cara, seperti mengantongi biaya, mengajukan pengeluaran palsu, atau memalsukan laporan keuangan (Bradley, 2015).

Kondisi yang sama terjadi di organisasi keagamaan, yang mengalami kurangnya akuntabilitas dan mengalami skema dan penipuan yang kejam. Pelaku menggunakan agama untuk menutupi tindakannya dengan menyesatkan dan menyalahgunakan aset organisasi (Morefield & Ramaswamy, 2011). Alasan lain yang membuat organisasi cenderung rentan terhadap kecurangan adalah organisasi jenis ini mengandalkan kepercayaan dan pemaafan. Kondisi ini menimbulkan dua masalah, yaitu mereka merasa bahwa mereka kebal dari penipuan, dan kedua, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama ketika membuat tuduhan kesalahan (Peter, 2015). Kepercayaan dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan peluang penipuan, terutama ketika tingkat kepercayaan yang tinggi berarti tidak ada keharusan untuk mengungkapkan informasi apa pun (Ventura & Daniel, 2008).

Fenomena tersebut di atas juga terjadi pada organisasi yang berbasis syariah, seperti bank

syariah meskipun dianjurkan untuk menjunjung tinggi taqwa, menghormati hak orang lain. (huquq al-ibad); berlaku adil dan adil (adl); dan menghindari riba, taruhan, penipuan, penggambaran yang salah, dan bentuk-bentuk penipuan lainnya (Muhammad, 2015). Selain itu, sistem keuangan Islam lebih menekankan konsep keadilan sosial (adl) dan kebajikan (ihsan), daripada memperoleh keuntungan maksimal sebagai praktik pembiayaan komersial (Sanusi & Syafiai, 2015).

Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perbankan syariah. Misalnya, beberapa tahun lalu, bank syariah di Bogor yang menyalurkan kredit kepada 197 nasabah bank fiktif mengakibatkan kerugian Rp159 miliar (Astuti dkk., 2019; Najib & Rini, 2016; Santika & Ghofur, 2020). Kondisi ini menegaskan bahwa prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah tidak serta merta membuat bank syariah kebal dari kasus penipuan (Astuti dkk., 2019). Selain itu, Tata Kelola Perusahaan Syariah tidak diterapkan secara memadai di bank syariah untuk mendukung penerapan prinsip syariah (Milenia dkk., 2021).

Selain organisasi bisnis berbasis syariah, terjadinya fraud juga merambah organisasi filantropi meskipun organisasi tersebut memiliki misi utama untuk memberikan hak atas kebutuhan dan menyampaikan risalah Islam sebagai pembawa damai (Lumakto & Dewi, 2021). Organisasi filantropi saat ini menerapkan platform crowdfunding untuk mengumpulkan uang melalui internet. Di sisi lain, itu mengekspos risiko penipuan dan kejahatan dunia maya (Hapsari dkk., 2021). Namun, tidak ada kerugian resmi yang dipublikasikan terkait penipuan donasi online (Lumakto & Dewi, 2021). Lebih-lebih lagi, Lumakto & Dewi (2021) mengemukakan bahwa penipuan terutama terjadi melalui platform Whatsapp dibandingkan dengan platform media sosial lainnya, karena platform yang mengacu pada *We Are Social 2021* lebih banyak digunakan oleh orang Indonesia (24%) dibandingkan dengan Instagram (18,4%).

Salah satu bentuk filantropi Islam adalah wakaf, yang menawarkan keleluasaan umat Islam untuk berkontribusi baik wakaf tunai maupun

wakaf aset. Donasi akan terkumpul sehingga dapat digunakan untuk pembangunan Masyarakat (Pitchay et al., 2018; Sanusi & Shafiai, 2015). Wakaf uang gencar digalakkan dengan berbagai model inovatif (Pitchay et al., 2018) dan dari banyak platform, seperti yang disebutkan sebelumnya, yang rentan terhadap penipuan (Lumakto & Dewi, 2021). Sementara itu, mengenai wakaf harta, Pitchay dkk., (2018) menunjukkan bahwa banyak kasus penipuan terjadi selama proses pertukaran (ibdal) dan substitusi (istibdal), khususnya di tanah wakaf. Penipuan dan korupsi mungkin terjadi terutama dalam hal keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji dan mengeksplorasi dari berbagai sumber baik dari buku maupun artikel ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mencegah dan Mendeteksi Penipuan

Manajemen berkonsentrasi pada pengendalian manajemen formal untuk mengintegrasikan operasi sampai awal 1990-an, sedangkan akuntansi sebagian besar digunakan untuk penganggaran dan masih menggunakan basis kas. Bahkan kontrol manajerial dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Konsep ini biasanya terkait dengan tindakan mengelola dan mengendalikan suatu perusahaan (proses pengendalian), serta data yang tersedia yang menjadi dasar kegiatan pengendalian. Anthony (1965) dikutip dalam Johanson dkk. (2001), membedakan sistem pengendalian manajemen dari prosedur pengendalian manajemen. Selanjutnya, Anthony (1965) berpendapat bahwa sistem membantu dan bagaimana proses itu terjadi. Kerangka kerja menjelaskan apa itu, tetapi mekanisme menjelaskan bagaimana ia beroperasi; untuk memahami sistem, seseorang harus terlebih dahulu mempelajari prosesnya. Pengakuan, pengukuran, pelaporan, penilaian, dan mobilisasi perubahan adalah enam langkah pengendalian manajemen (Johanson et al., 2001).

Setelah periode pengembangan yang panjang, fungsi MCS berkembang untuk memasukkan nilai dan keyakinan organisasi, serta pengaruh lingkungan, sosial, dan politik eksternal yang memengaruhi aktivitas organisasi; tidak lagi terbatas pada proses internal. MCS membantu manajemen dengan memberikan beragam informasi yang berkaitan dengan kebutuhan manajer di berbagai tingkat hierarki. MCS, misalnya, memberikan informasi kepada manajer operasional untuk membantu mereka membuat keputusan sumber daya dan kapabilitas yang lebih efektif, serta informasi kepada manajemen senior untuk membantu mereka menyelaraskan operasi dengan strategi organisasi. Hasilnya, MCS akan berfungsi sebagai landasan untuk pemahaman yang lebih baik tentang proses internal terkait faktor eksternal, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi (Chenhall & Euska, 2007), atau khususnya untuk memberikan keyakinan yang dapat diterima tentang keberhasilan pengendalian dalam tiga bidang: (1) efektivitas dan efisiensi operasional; (2) keterpercayaan pelaporan keuangan; dan (3) kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang relevan (Leitch, 2008). Saat ini, banyak bisnis yang masih mengubah dan mengembangkan sistem manajemen mereka menjadi domain properti tidak berwujud. Namun, pengendalian manajemen sumber daya tidak berwujud adalah proses yang sulit karena banyak tantangan yang berkaitan dengan konsep sumber daya tidak berwujud dan sistem pengendalian manajemen (Johanson et al., 2001). Tujuan dari setiap program anti-penipuan harus mencegah penipuan daripada hanya mengidentifikasinya. Meskipun menemukan penipuan sangat penting, akan lebih baik jika penipuan dapat dihindari atau dikurangi. Deteksi dan pencegahan saling terkait, dan bersama-sama membentuk sistem tindakan anti-penipuan (Lajang & Lajang, 2010).

Sebelum mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, kriteria pengendalian yang tepat harus dipilih. Defisiensi pengendalian internal dapat terjadi dalam dua cara: pertama, defisiensi desain dapat terjadi ketika pengendalian untuk mencapai tujuan pengendalian tidak ada, atau pengendalian ada tetapi tidak dirancang secara

efektif, sehingga tujuan pengendalian tidak tercapai. Kedua, cacat operasi mungkin muncul karena tidak berfungsi sebagaimana dimaksud, atau karena orang yang melaksanakan prosedur tidak memiliki otoritas atau kredensial yang sesuai untuk melakukan pengendalian dengan sukses (Ramos, 2008). Efektivitas sistem pengendalian internal sangat penting dalam penemuan dan pencegahan penipuan (Matsumura & Tucker, 1992). Dalam kebanyakan kasus, keadaan situasional (misalnya kontrol akuntansi yang kuat) akan mempengaruhi rendahnya pengendalian diri seseorang (Grazioli et al., 2006). Penilaian risiko harus dilakukan saat membangun sistem pengendalian penipuan untuk menentukan di mana risiko berada di perusahaan. Ini akan terdiri dari aset yang paling rentan, skema penipuan yang paling mungkin, dan tanda bahaya apa pun yang terkait (Lajang & Lajang, 2010). Ide dasarnya adalah bahwa manajemen risiko dan metode mitigasi harus secara langsung terkait dengan tujuan organisasi dan sub-organisasi. Organisasi harus berusaha untuk mengidentifikasi semua sumber daya, membuat kontrol dan mitigasi, dan memantau seluruh proses, membuat modifikasi umpan balik sesuai kebutuhan (Daya, 2009).

Pemahaman yang berfokus pada proses diperlukan untuk merancang sistem kontrol karena menggunakan kategori yang berfokus pada proses untuk melakukan evaluasi pengendalian internal meningkatkan pembelajaran dan pemikiran. Selanjutnya, mengatur informasi pendukung keputusan di sekitar penekanan proses dapat membantu dalam membuat penilaian yang lebih baik (Kopp & O'Donnell, 2005). Pendekatan yang berfokus pada proses dimulai dengan keputusan strategis; itu kemudian memengaruhi desain orang dan kontrol non-konvensional (non-keuangan) di dalam MCS (Sistem Kontrol Manajemen), serta komponen tradisional MCS. Ini menyiratkan bahwa organisasi harus memasukkan kontrol non-konvensional dan orang ke dalam MCS khas mereka, atau bahwa MCS harus terdiri dari berbagai jenis kontrol. Hal ini sesuai dengan konsep *balanced scorecard*, yang mengusulkan bahwa organisasi menggunakan kumpulan indikator konvensional (keuangan) dan non-tradisional (non-

keuangan) yang seimbang di empat sudut pandang. Akibatnya, Organisasi akan berkonsentrasi pada sejumlah utama pengukuran keuangan sebelum menambahkan ukuran non-tradisional yang sejalan dengan strategi Perusahaan (Wanderer, 2004). Kontrol manajemen adalah alat untuk menganalisis kinerja dan meningkatkan nilai pengetahuan. Kontrol manajemen, sebagai praktik pembelajaran organisasi, mencakup lebih dari sekadar metrik yang berbeda (Johanson et al., 2001). Akibatnya, PMS (Sistem Pengukuran Kinerja) akan berkontribusi positif pada penggunaan keterampilan dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, kewirausahaan, inovasi, dan pembelajaran organisasi (Henri, 2006). Memahami teori kontingensi dan TCE (Transaction Cost Economics) akan memberikan pengetahuan mendalam tentang strategi dan penyelarasan MCS (Wanderer, 2004). Selanjutnya, menurut teori ekonomi dan kontingensi, penggunaan indikator kinerja adalah hasil dari menyesuaikan desain indikator kinerja dengan strategi dan meningkatkan kegunaan ukuran kinerja (Perego & Hartmann, 2009).

Sistem Informasi Akuntansi dapat meningkatkan pengukuran keuangan (SIA). Fitur sistem akuntansi yang mungkin berdampak pada pembelajaran organisasi meliputi pertama, karakteristik lingkungan informasi; kedua, metode penyebaran informasi; dan ketiga, mekanisme koordinasi informasi. Berdasarkan Oukssel dkk. (1997), pembelajaran dalam organisasi yang lebih datar seringkali lebih akurat daripada pembelajaran dalam organisasi hierarkis. Trade-off biaya-manfaat antara kecepatan dan akurasi memiliki implikasi untuk desain AIS. Ketika presisi sangat penting, struktur yang lebih datar, seperti tim ahli, harus digunakan. Nilai aset merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Bukti menunjukkan bahwa efek langsung dari penyelidikan penipuan akuntansi meningkatkan harga saham. Namun, pengumuman biaya SEC secara dramatis mengurangi harga saham (Gerety & Lehn, 1997). tidakAspek lain untuk meningkatkan ukuran keuangan adalah memungkinkan pengendalian anggaran. Chapman dan Kihn (2009)

menemukan hubungan antara menyediakan kontrol anggaran dan beberapa bidang kinerja dalam menyelidiki mereka. Beberapa karakteristik kinerja mengungkapkan pengaruh yang signifikan secara statistik pada prosedur penganggaran; Namun, mereka berbeda dengan dimensi kinerja. Pengecualian adalah masalah keterbukaan internal, yang tampaknya berbanding terbalik dengan kinerja keuangan. Ketika kinerja keuangan buruk, hasil ini mungkin menyiratkan penggunaan anggaran yang lebih kuat untuk memahami operasi internal; sebagai konsekuensinya, peningkatan keterbukaan akan terjadi (Chapman & Kihn, 2009).

Selain aspek keuangan, ukuran non-keuangan juga merupakan aspek penting dari sistem kontrol. Banyak aspek yang tercakup dalam ukuran non-keuangan, seperti struktur organisasi. Struktur organisasi akan mempengaruhi pembelajaran organisasi yang akan ditingkatkan dengan penekanan pada sistem kepercayaan dan sistem diagnostik. Pembelajaran organisasi akan berdampak pada struktur pengetahuan, yang menerapkan konsep semakin tersedia informasi, semakin berguna dalam fungsi penilaian (Borthick et al., 2006; Johanson et al., 2001). Oleh karena itu, pembelajaran organisasi secara positif terkait dengan kinerja (Wanderer, 2007) karena insiden dan tingkat kesalahan prediksi manajerial terkait dengan prosedur tata kelola Perusahaan (Goodwin et al., 2009). Pembentukan budaya perusahaan yang dapat diterima di mana standar dan tujuan profesional diakui dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, para profesional akan percaya bahwa pendekatan paling penting untuk mencapai tujuan pribadi mereka adalah membantu bisnis mencapai tujuannya (Abernethy & Stoelwinder, 1995).

Pengendalian internal telah membaik, dengan klaim bahwa sekarang mencakup manajemen risiko. Manajemen risiko, di sisi lain, telah berkembang dan mengklaim untuk memasukkan pengendalian internal. Sejarah pengendalian internal dan manajemen risiko mengungkapkan pilihan terakhir: mengintegrasikan keduanya. Karena pelaku penipuan lebih canggih dari sebelumnya, saatnya telah tiba untuk mengelola risiko sambil memanfaatkan kemampuan sistem

control (Leitch, 2008). Menurut studi empiris yang tersedia, mayoritas pelaku penipuan yang signifikan memegang posisi kepercayaan keuangan, memiliki kedudukan pendidikan yang tinggi, menjelaskan tindakan mereka, dan berspesialisasi dalam penipuan (Kapardis & Kapardis, 2004). Setiap perusahaan memiliki struktur perusahaan dan kebijakan pengendaliannya. Lainnya lebih berguna daripada yang lain dalam mengurangi risiko penipuan manajemen. Prosedur anti-penipuan yang dirancang untuk mengurangi risiko bentuk penipuan tertentu yang menyebabkan bahaya bagi perusahaan adalah yang paling efektif. Merancang dan melaksanakan tindakan anti-penipuan yang efisien secara langsung bergantung pada evaluasi risiko tersebut, sehingga penipuan yang paling berbahaya harus diidentifikasi sebelumnya (Goldman, 2009).

Mitigasi Fraud dalam Organisasi Berbasis Syariah

Dalam organisasi berbasis syariah, akuntabilitas dipersepsikan bersifat horizontal dan vertikal, yang horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada sesama manusia, dan vertikal adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan (Arwani, 2020). Namun, semua organisasi rentan terhadap penipuan dan organisasi nirlaba dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi karena jenis organisasi ini bergantung pada kesusilaan manusia, misi moral, dan nilai-nilai etika. Oleh karena itu, organisasi cenderung memiliki tindakan pengendalian internal dan eksternal yang lemah (Greenlee et al., 2007; Khadra & Delen, 2020). Akibatnya, penyelewengan aset terjadi, terdiri dari 97% dari semua penipuan yang dilaporkan (Greenlee et al., 2007). Namun, tidak ada model tunggal dari rencana mitigasi penipuan yang dapat digunakan di semua organisasi (Peter, 2015) karena malpraktik selalu mengambil bentuk yang berbeda dan berkembang (Ascarya, 2021).

Penipuan dalam organisasi amal sebagian besar terjadi karena kurangnya akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan mengharuskan regulator untuk mengatasi masalah ini (Ahmad & Rusdianto, 2020). Misalnya, IRS (Internal Revenue Service) merekomendasikan agar organisasi nirlaba

membentuk komite audit dan mempekerjakan auditor eksternal untuk memeriksa dan menemukan penyimpangan dalam suatu organisasi (Khadra & Delen, 2020). Lebih-lebih lagi, Khadra & Delen, (2020) menunjukkan bahwa hanya 9% organisasi nirlaba yang mempekerjakan akuntan profesional. Akuntabilitas yang ditetapkan dapat mengurangi potensi penipuan (Arwani, 2020) yang dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan dan prosedur tata Kelola (Archambeault & Webber, 2018) atau sistem informasi akuntansi (Arwani, 2020). Dampak tata kelola perusahaan dalam mengurangi penipuan telah dibuktikan dan diperiksa secara menyeluruh di organisasi nirlaba (Khadra & Delen, 2020). Demikian pula pengelolaan wakaf yang baik diperlukan untuk menjadi lembaga yang lebih baik lagi dalam melayani umat di masa depan yang merupakan bagian dari *Islamic Social Responsibility* (Sanusi & Syafiai, 2015).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak strategi untuk memalsukan rekening keuangan dan mencuri aset perusahaan dapat digunakan untuk melakukan penipuan. Akibatnya, mempelajari penipuan hanya berdasarkan peristiwa sejarah akan gagal untuk menyampaikan gambaran lengkap tentang penipuan karena sifatnya yang multifaset, siklis, dan dinamis (Reinstein & Bayou, 1998). Selain pelaporan keuangan yang tidak jujur dan penggelapan aset, penipu mungkin terlibat dalam skema korupsi untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka di sebuah perusahaan. Penipuan akan mengakibatkan kerugian besar; oleh karena itu hal ini dipandang sebagai masalah yang sangat mahal.

Untuk menyembunyikan perilaku curang, enam strategi penipuan dapat digunakan. Tiga strategi pertama dimaksudkan untuk mengganggu proses pencarian informasi, sedangkan langkah-langkah lainnya dimaksudkan untuk meniru penipuan (Grazioli et al., 2006). Mereka menyiratkan bahwa manusia memiliki kemampuan hebat untuk mengambil informasi bahkan dari informasi terkecil dan membenarkan pelanggaran penipuan. Akibatnya, pejabat audit harus menggantikan norma yang membatasi pemikiran

strategis di antara auditor dengan persyaratan yang mendorongnya (Wilks & Zimbelman, 2004b). Auditor dapat mengantisipasi untuk mengungkap kecurangan melalui penalaran strategis karena mereka dapat menyesuaikan taktik mereka dengan situasi tertentu. Pemikiran strategis, di sisi lain, membutuhkan informasi dan keahlian yang lebih besar.

Memperbaiki proses organisasi berbasis syariah untuk membatasi atau menghilangkan komponen penyebab penipuan dapat membantu mencegah kejahatan penipuan. Pencegahan penipuan harus mencakup tindakan jangka pendek (prosedural) dan jangka panjang (budaya). Pencegahan memerlukan pemeriksaan lingkungan dan proses yang mendorong dilakukannya penipuan. Ini akan memberikan data yang akan memungkinkan bisnis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, pengendalian internal, dan prosedur tata kelola organisasi (Cendrowski dkk., 2007).

Pengendalian internal telah meningkat, dan pernyataan telah dibuat bahwa sekarang termasuk manajemen risiko. Manajemen risiko, di sisi lain, telah berkembang dan mengklaim untuk memasukkan pengendalian internal. Akibatnya, pengendalian internal dan manajemen risiko saling terkait dan diharapkan dapat saling melengkapi untuk menjembatani pandangan (Leitch, 2008). Tindakan anti-penipuan terbaik, di sisi lain, dianggap berasal dari jenis penipuan tertentu yang dihadapi perusahaan. Merancang dan menerapkan prosedur anti-penipuan yang efektif bergantung pada evaluasi jenis risiko; karenanya, penipuan paling berbahaya harus dikenali terlebih dahulu (Goldman, 2009). Teori kontingensi dan teori TCE (*Transaction Cost Economic*) akan mengajari Anda cara membangun dan menjalankan sistem anti-penipuan (Wanderer, 2004). Dengan demikian, kontrol anti-penipuan dapat dirancang dan diterapkan secara tepat untuk sifat perusahaan sambil mengkonsumsi sumber daya sesedikit mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernethy, MA, & Stoelwinder, JU (1995). Peran Kontrol Profesional dalam Manajemen Organisasi Kompleks. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* Vol.20 No.1, 1-17.
- Achmad, L. (2022). Corporate Social Responsibility: Divesting From Apartheid. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 1(1), 118-135. <https://doi.org/10.58223/icie.v1i1.110>
- Ahmad, ZA, & Rusdianto. (2020). Dampak Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan dan Niat Menyumbangkan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Syirkah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2), 197-227.
- Archambeault, DS, & Webber, S. (2018). Kelangsungan Hidup Penipuan di Organisasi Nirlaba: Bukti Empiris. *Manajemen dan Kepemimpinan Nirlaba*, 1-18.
- Arwani, A. (2020). Akuntansi Syariah pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tentang zakat dan wakaf mengambil era revolusi industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. *Jurnal Penelitian Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2), 229-258.
- Ascarya, A. (2021). Peran Keuangan Sosial Syariah di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*.
- Astuti, MA, Rozali, RD, & Cakhyaneu, A. (2019). Pencegahan Fraud pada Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Penerapan Corporate Governance Syariah. *The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP)* Tema: "Keberlanjutan dan Pertumbuhan Sosial Ekonomi," 183-202.
- Azizah Surury, N. ., & Hamdan Ainulyaqin, M. . (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737-744. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>
- Borthick, AF, Curtis, MB, & Sriram, RS (2006). Mempercepat Akuisisi Struktur Pengetahuan untuk Meningkatkan Kinerja dalam Tinjauan Pengendalian Internal. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 31, 323-342.
- Bradley, JM (2015). Memberdayakan Karyawan untuk Mencegah Penipuan di Organisasi Nirlaba.
- Brazel, JF, Jones, KL, & Zimbelman, MF (2009). Menggunakan Ukuran Nonfinansial untuk Menilai Risiko Penipuan. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1135-1166.
- Cendrowski, H., Martin, JP, & Petro, LW (2007). *Buku Pegangan Pencegahan Penipuan*. John Wiley and Sons, Inc.
- Chapman, CS, & Kihn, L.-A. (2009). Integrasi Sistem Informasi, Memungkinkan Kontrol dan Kinerja. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 34, 151-169.
- Chenhall, RH, & Euska, KJ (2007). Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Perubahan Organisasi yang Direncanakan: Analisis Dua Organisasi. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 32, 601-637.
- Choo, F. (1996). Konten Pengetahuan Auditor dan Kinerja Penilaian: Pendekatan Skrip Kognitif. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat*, Vol.21, No.4, 339-359.
- Deshmukh, A., & Millet, I. (1998). Pendekatan Proses Hirarki Analitik untuk Menilai Risiko Penipuan Manajemen. *Jurnal Riset Bisnis Terapan*, Volume 15, Nomor 1, 87-102.
- Erfan Muhammad, Dewi Retno Puspita, & Sukron Mamun. (2023). Pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Kompleksitas Operasi, Dan Pergantian Auditor Terhadap Audit Delay (Study Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 25 - 36. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.773>
- Fatimah, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Efektifitas Audit Internal Syariah di Perbankan Syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1179-1187. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.530>
- Gerety, M., & Lehn, K. (1997). Penyebab dan Akibat Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Manajerial dan Keputusan*, Vol.18, No.7/8, 587-599.
- Goldmann, P. (2009). *Buku Kerja Anti-Penipuan*

- dan Kontrol. John Wiley & Sons, Inc.
- Goodwin, J., Ahmed, K., & Heaney, R. (2009). Tata Kelola Perusahaan dan Prediksi Dampak Adopsi AIFRS. *ABACUS*, Vol.45, No.1, 124-145.
- Grazioli, S., Jamal, K., & Johnson, PE (2006). Pendekatan Kognitif untuk Deteksi Penipuan. *Jaringan Penelitian Ilmu Sosial*, 1-34.
- Greenlee, J., Fischer, M., Gordon, T., & Keating, E. (2007). Investigasi Penipuan di Organisasi Nirlaba: Kejadian dan Penghalang. *Kuartalan Sektor Nirlaba dan Sukarela*, 36(4), 676-694.
- Hapsari, MI, Thaker, MABM, Mohammed, MO, & Duasa, J. (2021). Kemungkinan penggunaan model crowdfunding-wakaf di Malaysia. *Jurnal Internasional Etika dan Sistem*.
- Henri, J.-F. (2006). Sistem dan Strategi Pengendalian Manajemen: Perspektif Berbasis Sumber Daya. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 31, 529-558.
- Johanson, U., Martensson, M., & Skoog, M. (2001). Memobilisasi Perubahan Melalui Pengendalian Manajemen Intangibles. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 26, 715-733.
- Kapardis, A., & Kapardis, MK (2004). Meningkatkan Pencegahan dan Deteksi Penipuan dengan Membuat Profil Pelaku Penipuan. *Perilaku Kriminal dan Kesehatan Mental*, Vol.14, 189-201.
- Khadra, HA, & Delen, D. (2020). Pelaporan Penipuan Organisasi Nirlaba: Apakah Tata Kelola Penting? *Jurnal Internasional Akuntansi dan Manajemen Informasi*, 28(3), 409-428.
- Knapp, CA, & Knapp, MC (2001). Pengaruh Pengalaman dan Penilaian Risiko Kecurangan Eksplisit dalam Mendeteksi Penipuan dengan Prosedur Analitis. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 26, 25-37.
- Kopp, LS, & O'Donnel, E. (2005). Pengaruh Fokus Proses Bisnis pada Pengetahuan Kategori dan Evaluasi Pengendalian Internal. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 30, 423-434.
- Leitch, M. (2008). Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang Cerdas: Merancang Sistem Pengendalian Risiko Berkinerja Tinggi. Penerbitan Gower Terbatas.
- Lumakto, G., & Dewi, NK (2021). Memahami Modus dan Pencegahan Penipuan Penggalangan Donasi Berani. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 393-418.
- Mancino, J. (1997). *Jurnal Akuntansi*. <http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1997/Apr/mancino.htm>
- Marks, JT (2012). Pelanggaran Kepercayaan: Risiko Penipuan di Organisasi Nirlaba. <https://nonprofitrisk.org/resources/articles/a-violation-of-trust-fraud-risk-in-nonprofit-organizations/>
- Matsumura, EM, & Tucker, RR (1992). Deteksi Penipuan: Landasan Teoritis. *Tinjauan Akuntansi*, Vol.67, No.4, 753-782.
- Milenia, HF, Pratiwi, SS, Syaifei, AW, & Rahmi, AN (2021). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Penipuan Asia Pasifik*, 6(223-233).
- Mohammad, MTSH (2015). Perspektif teoretis dan wali amanat tentang pendirian bank sosial Islam (wakaf). *Humanomik*, 31(1), 37-73.
- Morefield, R., & Ramaswamy, V. (2011). Ekonomi dan Forensik Penipuan dan Penyalahgunaan oleh Organisasi Keagamaan Bebas Pajak versus Amandemen Pertama. *Jurnal Riset Bisnis Terapan*, 27(2).
- Najib, H., & Rini. (2016). Syariah Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131-146.
- Norman, CS, Rose, AM, & M., RJ (2010). Jalur Pelaporan Audit Internal, Dekomposisi Risiko Fraud, dan Penilaian Risiko Fraud. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat*, 546-557.
- Ouksel, AM, Mihavics, K., & Chalos, P. (1997). Sistem Informasi Akuntansi dan Pembelajaran Organisasi: Sebuah Simulasi. *Akuntansi, Manajemen dan Teknologi Informasi*, Vol.7, No.1, 1-19.
- Pagano, M., & Immordino, G. (2008). Penipuan Perusahaan, Tata Kelola dan Audit. *Jaringan Penelitian Ilmu Sosial*, 1-40.
- Patterson, E., & Noel, J. (2008). Strategi Audit dan Berbagai Peluang Penipuan dari Pelaporan yang Salah dan Defalcation. *Jaringan Penelitian Ilmu Sosial*, 1-38.

- Pedneault, S. (2009). *Penipuan 101 - Teknik dan Strategi untuk memahami penipuan*. John Wiley and Sons, Inc.
- Perego, P., & Hartmann, F. (2009). *Menyelaraskan Sistem Pengukuran Kinerja Dengan Strategi: Kasus Strategi Lingkungan*. ABACUS, Vol.45, No.4, 397-428.
- Perols, J. (2011). *Deteksi Penipuan Laporan Keuangan: Analisis Statistik dan Algoritma Pembelajaran Mesin*. *Auditing: Jurnal Praktek & Teori* Vol.30, No.2, 19-50.
- Peters, CS (2015). *Lebih Dari Sekedar Perbuatan Baik: Penipuan Dalam Organisasi Keagamaan*. Universitas Utika.
- Pitchay, AA, Thaker, MAMT, Mydin, AA, & Azhar, Z. (2018). *Model koperasi-wakaf: proposal untuk mengembangkan tanah wakaf menganggur di Malaysia*. *Jurnal Internasional Keuangan Islam*, 10(2), 225-236.
- Daya, M. (2009). *Manajemen Risiko Tidak Ada*. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 34, 849-855.
- Ramamoorti, S. (2008). *Psikologi dan Sosiologi Penipuan: Mengintegrasikan Komponen Ilmu Perilaku Ke dalam Kurikulum Akuntansi Penipuan dan Forensik*. *Isu dalam Pendidikan Akuntansi*, Vol.23, No.4, 521-533.
- Ramos, M. (2008). *Bagaimana Mematuhi Sarbanes-Oxley Bagian 404: Menilai Efektivitas Pengendalian Internal*. John Wiley & Sons, Inc.
- Reinstein, A., & Bayou, ME (1998). *Struktur Komprehensif untuk Membantu Menganalisis, Mendeteksi, dan Mencegah Penipuan*. *Jaringan Penelitian Ilmu Sosial*, 1-23.
- Santika, A., & Ghofur, RA (2020). *Pengaruh Pengaduan Syariah Terhadap Fraud Pada Bank Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi*, 3 (15-22).
- Sanusi, S., & Shafiai, MHM (2015). *Pengelolaan Wakaf Tunai: Menuju Pembangunan Sosial Ekonomi Umat Islam di Malaysia*. *Jurnal Pengurusan*, 43, 3-12.
- Seow, J.-L. (2009). *Penggunaan Isyarat dalam Penilaian Risiko Penipuan Laporan Keuangan: Pengaruh Pengetahuan Teknis dan Penggunaan Bantuan Keputusan*. *Akuntansi dan Keuangan*, Vol.49, 183-205.
- Shelton, SW, Whittington, ATAU, & Landsittel, D. (2001). *Praktik Penilaian Risiko Penipuan Perusahaan Audit*. *Cakrawala Akuntansi*, Vol.15, No.1, 19-33.
- Simon, SI (1965). *Penipuan di Neraca*. *Review Akuntansi*, Vol.40, No.2, 401-406.
- Lajang, TW, & Lajang, AJ (2010). *Audit Penipuan dan Akuntansi Forensik*. John Wiley & Sons, Inc.
- Skousen, CJ, Smith, KR, & Wright, CJ (2008). *Mendeteksi dan Memprediksi Penipuan Laporan Keuangan: Efektivitas Segitiga Penipuan dan SAS No.99*. *Jaringan Penelitian Ilmu Sosial*, 1-39.
- Srivastama, RP, Mock, TJ, & Turner, JL (2009). *Formula Risiko Penipuan Bayesian untuk Audit Laporan Keuangan*. ABACUS, 66-87.
- Ventura, M., & Daniel, SJ (2008). *Peluang Penipuan dan Penggelapan dalam Organisasi Keagamaan: Sebuah Studi Eksplorasi*. *Jurnal Akuntansi Forensik & Investigasi*, 2(1).
- Veronika, A., Ainulyaqin, M. H., & Panggabean, E. I. A. (2023). *Wishtleblowing dalam Perspektif Islam*. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(2), 074-082. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/24202>
- Widener, SK (2004). *Sebuah Investigasi Empiris Hubungan Antara Penggunaan Strategic Human Capital dan Desain Sistem Pengendalian Manajemen*. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 29, 377-399.
- Widener, SK (2007). *Analisis Empiris Kerangka Pengungkit Kontrol*. *Akuntansi, Organisasi dan Masyarakat* 32, 757-788.
- Wilks, TJ, & Zimbelman, MF (2004a). *Dekomposisi Penilaian Risiko Penipuan dan Sensitivitas Auditor terhadap Isyarat Penipuan*. *Penelitian Akuntansi Kontemporer*, Vol.21 No.3, 719-745.
- Wilks, TJ, & Zimbelman, MF (2004b). *Menggunakan Teori Permainan dan Konsep Penalaran Strategis untuk Mencegah dan Mendeteksi Fraud*. *Cakrawala Akuntansi*, Vol.18, No.3, 173-184.
- Zimbelman, MF (1997). *Pengaruh SAS No. 82 pada*

Perhatian Auditor terhadap Faktor Risiko
Penipuan dan Keputusan Perencanaan Audit.
Jurnal Penelitian Akuntansi, Vol.35 Tambahan,
75-97.